

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI KECAMATAN SELAKAU TIMUR

Oleh:  
**RYAN IRFIAN**  
NIM. E01112034

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: [ryanirfian@gmail.com](mailto:ryanirfian@gmail.com)

## Abstrak

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur yang belum terlaksana secara optimal. Belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut terlihat dari timbulnya permasalahan yang ada di lapangan seperti masih terdapatnya pengelolaan pertambangan rakyat yang dikelola secara ilegal dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat dan adanya aktivitas PETI menyebabkan kerusakan lingkungan di antaranya lahan pertanian, perkebunan, aliran sungai, kawasan hutan dan lain sebagainya. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, maka penulis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn sebagai pisau analisis. Teori Van Metter dan Van Horn diharapkan mampu memberikan gambaran dan penilaian sejauh mana para pelaksana kebijakan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Metter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sehingga tujuan yang ingin dicapai belum terealisasi dengan baik. Pertama, sumberdaya manusia yang belum memadai menyebabkan sulitnya untuk melaksanakan penjabaran tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari para pelaksana kebijakan. Kedua, karakteristik agen pelaksana yaitu kinerja struktur birokrasi yang dirasakan lambat dalam pembuatan izin baik izin wilayah pertambangan rakyat (WPR) ataupun izin pertambangan rakyat (IPR) menyebabkan aktivitas pengelolaan pertambangan rakyat menjadi kegiatan yang ilegal. Ketiga, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu proses penyampain isi dan tujuan kebijakan dari para pelaksana kebijakan ke target group yang belum dilaksanakan secara menyeluruh menyebabkan informasi yang beredar hanya ke sebagian kelompok masyarakat tertentu. Keempat, kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu adanya pertentangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat menyebabkan kebijakan sulit untuk implementasi secara maksimal.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pertambangan, Rakyat

## IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF SAMBAS REGENCY NO 4/2013 ON THE MANAGEMENT OF PEOPLE'S MINING IN EASTERN SELAKAU SUBDISTRICT

### Abstract

This research aims to explain the factors that affect the performance of Implementation of Regional Regulation of Sambas Regency No 4/2013 On The Management of People's Mining In Eastern Selakau Subdistrict that has not been implemented optimally. It can be seen from the management of mining that is not in accordance with the Regional Regulation sambas Regency No. 4/2013 On The management of The people's Mining and the presence of activities of illegal mining that causes damage to the environment including agricultural land, plantations, streas, forests, etc. to analyze the problem, the research uset the theory of Van Mattr and Van Horn for the analysis. The theory of Van Matter and Van Horn is expected to provide an overview and assessment of the extent to which the implementer carry out the policy goals set in the policy. There are six variables that affect the performance of the implementation as put forward by van matter and Van Horn i.e. the size and objectives of the policy, resources, the characteristics of the executing agency, the attitude/tendency (disposition) of the implementer, communication between the organization and implementing activities, as well as social, economic, and political conditions. The research concluded that there are several variables that affect the performance of policy implementation that contribute to the goals not fully realized. Firs, inadequate human resources make it difficult to carry out the basic tasks, functions and authority of the policy implementer. Second, the performance characteristics of the implementing agency i.e. the slow bureaucratic structure to issue small scale people's mining area (WPR) or people's mining license (IPR) causing people's mining to be illegal activities. Third, communication between the organization and implementing agency where the process of socializing the content and policy objectivies of the policy implementer to the target groups has not been implemented fully leading to information being circulated only among some particular group of people. Fourth, social, economic and political conditions i.e the contradiction between policy goals and social, economic, and political conditions in society that makes is difficult to implement the policy optimally.

*Keywords: Implementation, Policy, Mining, People*

### A. PENDAHULUAN

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Keadaan geografis yang beraneka ragam menjadikan Kabupaten Sambas menjadi daerah yang mempunyai potensi pengelolaan aset daerah yang menjanjikan. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari struktur geografis yang beraneka macam meliputi daerah pesisir (pantai), dataran rendah, pegunungan,

bukit, dan aliran sungai. Dengan adanya keberagaman keadaan geografis tersebut, tentunya memberikan kekayaan alam yang melimpah untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi daerah.

Secara umum kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut undang-undang tersebut pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang

berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, sedangkan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Pengelolaan pertambangan rakyat di Kabupaten Sambas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat. Peraturan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan pedoman untuk melakukan aktivitas pengelolaan tambang. Dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di bidang pertambangan rakyat untuk menjamin kepastian hukum serta terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan.

Maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat telah disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi “ pengaturan pengelolaan pertambangan rakyat

dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat “. Selain itu, tujuan pengelolaan pertambangan rakyat juga telah disampaikan pada Pasal 3 Ayat 1 – 4 yang berbunyi: (1) menjamin pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara komperensif, (2) menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, (3) menjamin kepastian hukum dalam pelanggaran kegiatan pertambangan rakyat, dan (4) meningkatkan pendapatan lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, segala bentuk penyimpangan terhadap aktivitas pertambangan dapat diberikan sanksi sesuai dengan isi dari peraturan daerah tersebut serta pengelolaan pertambangan rakyat dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas.

Aktivitas pertambangan tanpa izin banyak dilakukan di empat kecamatan yang berbeda di antaranya adalah Kecamatan Selakau Timur, Tebas, Subah, dan Paloh. Keempat lokasi tersebut sering menjadi target operasi dari Kepolisian Resort Sambas dan instansi terkait. Masih banyaknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sambas

merupakan salah satu tolak ukur dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat. Artinya implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal.

Keempat lokasi tersebut merupakan lokasi pertambangan rakyat yang banyak melakukan aktivitas tanpa izin perptambangan dari instansi terkait. Kecamatan Selakau Timur merupakan salah satu lokasi yang paling luas dalam melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), salah satunya di Desa Buduk Sempadang. Desa Buduk Sempadang salah satu lokasi yang mempunyai kandungan mineral sangat besar yaitu berupa emas. Banyaknya kandungan emas yang terdapat di Desa Buduk Sempadang menyebabkan masyarakat lebih memilih melakukan aktivitas pertambangan. Akan tetapi, aktivitas pertambangan yang mereka lakukan tidak mempunyai perizinan yang legal. Artinya, apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Berdasarkan latar belakang, menjadi permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan

Rakyat antara lain adalah (1) masih terdapatnya pengelolaan pertambangan rakyat yang dikelola secara ilegal dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat, (2) adanya aktivitas PETI menyebabkan kerusakan lingkungan di antaranya lahan pertanian, perkebunan, aliran sungai hutan dan lain sebagainya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Kecamatan Selakau Timur belum berhasil.

## B. KAJIAN TEORI

Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal ini yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut

dirumuskan oleh apa yang disebut oleh salah satu pakar kebijakan yaitu Easton (dalam Agustino, 2014:8) sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya. Easton juga menjelaskan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikuti sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau

menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Menurut Wijaya dan Suparto (dalam Pasolong, 2010:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hinggis (dalam Pasolong, 2010:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategis. Grindle (dalam Pasolong, 2010:57) implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sependapat mungkin mempengaruhinya. Gordon (dalam Pasolong, 2010:57) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014 :142) mengatakan bahwa setidaknya ada enam

variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, adalah :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dapat dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan. Akan tetapi di dalam beberapa haluan ukuran-ukuran dasar dan sasaran kebijakan harus diedukasikan oleh penelitian perorangan, pada akhirnya, pilihan ukuran-

ukuran pencapaian bergantung pada tujuan yang didukung oleh penelitian.

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tatapi diluar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah : sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan anggaran pelik untk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kecuran dana berjalan dengan

baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang teralalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud Van Meter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2011:100) yang dimaksudkan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik dan implementasi kebijakan ini akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat sasaran dengan agen pelaksananya.

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial

maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2007:193) mengatakan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legeslatif dan eksekutif)
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat-tingkat komunikasi “terbuka”, yang diidefenisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

d. Sikap/Kecendrungan (*Dispositioni*) para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yakni : (a) *respons* implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. (b) *kognisi*, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) *intesitas disposisi* implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi kebijakan yang berhasil.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan, dengan begitu sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagi sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Berkaca pada studi di lapangan, implementasi peraturan daerah ini tidak berjalan dengan baik, karena masih terdapat beberapa persoalan yang masih bertentangan dengan maksud dan tujuan dari peraturan daerah tersebut. Penyimpangan yang terjadi di luar tujuan peraturan daerah tersebut seharusnya mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah.

Penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan kebijakan yang terjadi merupakan salah satu contoh ketidakberhasilan implementasi kebijakan daerah yang pada tataran ini adalah

implementasi Peraturan Daerah kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pertambangan Rakyat. Penulis mencoba mengkaji dan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa suatu kebijakan tidak terimplementasi secara baik. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah masalah yang terjadi, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut model menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014 : 142), ada enam variabel mempengaruhi kinerja implementasi.

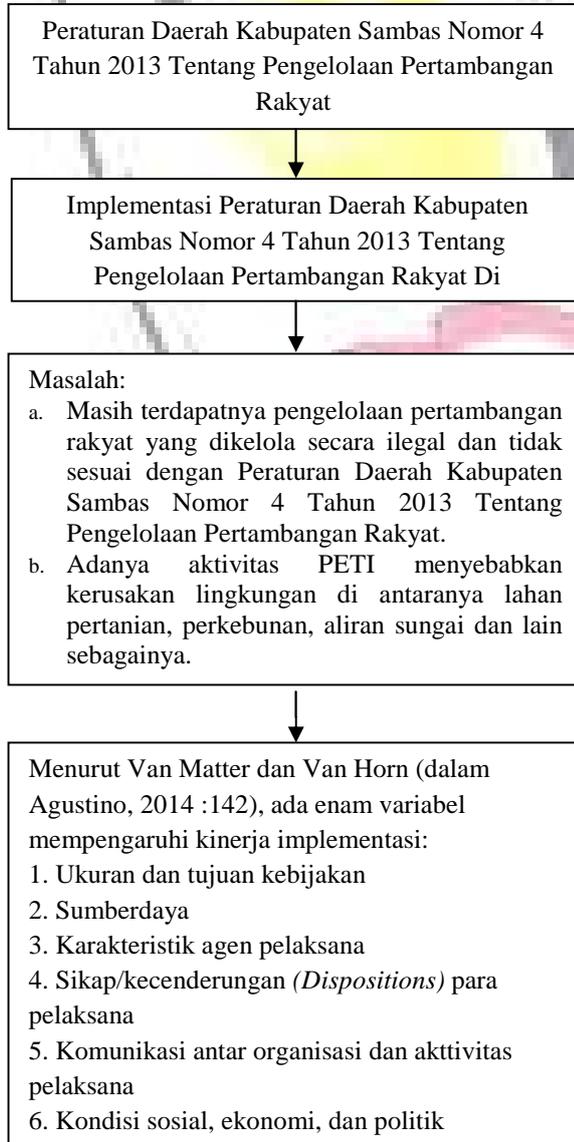
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/kecenderungan (Disposition) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Hasil yang diharapkan dari keenam variabel ini, dapat memperbaiki kinerja pelaksana dan membawa pada Keberhasilan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur. Secara garis besar, dapat penulis gambarkan tentang kondisi di lapangan terkait enam variabel yang

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur

### Kerangka Pikir Penelitian



### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif, dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mengidentifikasi dan mendeskripsikan hal-hal yang terjadi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan dengan fakta dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur. Diharapkan analisis tersebut dapat mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya sehingga ditemukan pola-polanya sebagai wacana untuk perbaikan ke arah implementasi yang lebih efektif dan efisien.

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain pra survey, observasi dan pengambilan data, konsultasi dan membuat laporan penelitian. Tempat penelitian yang diteliti oleh penulis adalah di Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut untuk diteliti seperti yang telah peneliti ungkapkan di latar belakang bahwa adanya permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat. Permasalah pertambangan rakyat di kecamatan Selakau Timur sampai sekarang belum dapat diselesaikan meskipun telah diterbitkan peraturan perundang-undangannya. Untuk itulah penulis menentukan tempat penelitian di Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pertambangan Umum dan Geologi Dinas PU Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sambas.
2. Kepala Satuan Reskrim Polres Sambas
3. Kapolsek Selakau
4. Camat Selakau Timur

5. Masyarakat selaku pengelola pertambangan rakyat berjumlah 2 orang

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Menurut Miles dan Hiberman (Sugiyono:2008;183) terdapat aktivitas dalam analisis data, yang mana aktivitas ini saling berhubungan dalam menganalisa data yang didapat. Jadi pada penelitian ini, dalam menganalisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. Uji menguji data yang diperoleh dalam penelitian yang sah dan benar maka diperlukan uji kredibilitas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Dalam teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara serempak.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat digambarkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan

Selakau Timur belum terlaksana secara maksimal. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur ukuran dan tujuan kebijakan yang terkandung di dalamnya sudah dirasakan sudah cukup jelas dan memberikan suatu bentuk pemahaman akan pentingnya proses pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas pengelolaan pertambangan rakyat. Di samping itu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pihak instansi terkait juga mempunyai ukuran tersendiri untuk dijadikan sebagai pedoman ataupun tolak ukur melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Sumberdaya

Sumberdaya yang paling di tekankan dalam teori Van Matter dan Van Metter adalah sumberdaya keuangan. Terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur sumberdaya

keuangan yang dimiliki sudah dirasakan cukup memadai. Akan tetapi, ketersediaan sumberdaya manusia yang belum mencukupi sehingga menyebabkan sulitnya untuk melaksanakan tujuan dari kebijakan tersebut. Kurangnya sumberdaya manusia memberikan dampak pada pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan akan sulit untuk terlaksana secara efektif.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Peranan birokrasi yang belum mampu melaksanakan kegiatan administrasi secara efektif dan efisien menyebabkan belum terlaksananya tujuan dari kebijakan tersebut. Hal tersebut tercermin dari kinerja birokrasi Dinas Pu Bina Marga Pengairan Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sambas yang belum mampu menyelesaikan perizinan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

d. Sikap/Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana

Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur sudah dirasakan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat melalui indikator yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur yang di antaranya adalah tingkat pemahaman para pelaksana

terhadap ukuran dan tujuan kebijakan, respon para pelaksana dan tingkat pengawasan yang dilakukan di lapangan. Kesemua indikator tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah diberikan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi antar instansi terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur sudah berjalan secara maksimal. Garis koordinasi yang dilakukan telah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada pada instansi masing-masing. Koordinasi yang sering dilakukan oleh dinas terkait melalui penyampaian informasi tentang pengawasan yang akan dilakukan di lapangan. Dari perspektif lain, komunikasi dalam bentuk penyampaian (sosialisasi) terhadap isi dan tujuan kebijakan kepada target group belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan salah faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan secara maksimal. Kurang partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan kebijakan tersebut dikarenakan tujuan kebijakan yang hendak dicapai bertentangan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada di tengah masyarakat.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat digambarkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap kurang maksimalnya kinerja implementasi kebijakan tersebut. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ketersedian sumberdaya manusia yang belum mencukupi sehingga menyebabkan sulitnya untuk melaksanakan tujuan dari kebijakan tersebut. Kurangnya sumberdaya manusia memberikan dampak pada

pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan akan sulit untuk terlaksana secara efektif.

- b. Peranan birokrasi yang belum mampu melaksanakan kegiatan administrasi secara efektif dan efisien menyebabkan belum terlaksananya tujuan dari kebijakan tersebut. Hal tersebut tercermin dari kinerja birokrasi Dinas PU Bina Marga Pengairan Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sambas yang belum mampu menyelesaikan perizinan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
- c. Penyampaian (sosialisasi) terhadap isi dan tujuan kebijakan kepada target group belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
- d. Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan salah faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan secara maksimal. Kurang partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan kebijakan tersebut dikarenakan tujuan kebijakan yang hendak dicapai bertentangan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada di tengah masyarakat.

## F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran agar Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Kecamatan Selakau Timur menjadi lebih baik.

### 1. Sumberdaya

Ketersediaan sumberdaya manusia yang belum mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu masalah yang harus mendapatkan solusi. Untuk itulah dalam hal ini perlunya pengadaan pegawai atau penambahan staf di bagian ESDM Dinas PU, Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sambas. Selain itu, perlunya penempatan unit pelayanan teknis (UPT) di masing-masing kecamatan secara merata agar mudah melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).

### 2. Karakteristik Agen Pelaksana

Mendorong pihak Dinas PU, Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sambas untuk secepatnya

menyelesaikan penetapan wilayah pertambangan Rakyat (WPR). Dengan ditetapkannya WPR maka langkah selanjutnya masyarakat tinggal mengurus izin pertambangan rakyat (IPR) mereka masing-masing sehingga mereka tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal.

### 3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam implementasi suatu kebijakan diharapkan terjalannya komunikasi baik dan lancar guna menimbulkan rasa kepercayaan antar pelaksana kebijakan. Apabila komunikasi antar organisasi telah berjalan baik dan lancar maka untuk melaksanakan kebijakan dirasakan akan mudah untuk dilaksanakan secara maksimal. Sebagai catatan, dalam implementasi Dinas PU, Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sambas Di Kecamatan Selakau timur kegiatan sosialisasi terkait isi dan tujuan kebijakan agar dilaksanakan secara maksimal agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terkandung dalam kebijakan yang ingin dilaksanakan.

### 4. Kondisi Sosila, Ekonomi, dan Politik.

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan maka perlu diperhatikan ada beberapa hal yang

perlu dipandang secara mendalam. Kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat perlu diperhatikan secara menyeluruh. Tujuan kebijakan yang akan dicapai belum tentu searah dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada di masyarakat. Para pelaksana kebijakan harus membangun hubungan baik dengan norma dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat guna memberikan pengertian dan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi pententangan antara masyarakat dan pemerintah daerah ataupun pelaksana kebijakan.

## G. KETERBATASAN PENELITIAN

Dari penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, hal yang menjadi kendala dan keterbatasan dalam penelitian adalah subjek penelitian tidak 100 % terbuka secara detail dalam menyampaikan informasi, sehingga dalam melakukan analisis terhadap masalah penulis mengalami kendala. Di samping itu, sulitnya memperoleh data rinci terkait masalah pertambangan tanpa izin (PETI) menyebabkan data yang penulis tampilkan

dirasakan kurang memadai. Keterbatasan lain yang peneliti rasakan adalah lokasi pertambangan rakyat yang akan diteliti memiliki jarak yang jauh dan sulit untuk ditempuh.

## H. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: PT Alfabeta.

Masyhuri dan Zainudin. 2008. *Metode Penelitian Praktis dan Aplikatif*. Bndung: PT Refika Aditama.

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik – Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Reflika Aditama.

Subarsono, AG. 2011, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet.

\_\_\_\_\_.2013. *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi Ke*

*implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori, Proses*. Yogyakarta: Media Pressido

### Skripsi/jurnal:

Eko Noris. 2012. *Pelaksanaan Pemberian izin Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 19 Tahun 2007 dan Pengusahaan Energi Di Kabupaten Dharmasraya*. Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang.

Yusnani. 2014. *Implementasi Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang*. Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

### Dokumen:

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Pengairan Energi dan Sumberdaya Mineral.

**Internet**

[http://r.search.yahoo.com/\\_ylt=A2oKmMiIqzZY.HIAywD3RQx.;\\_ylu=X3oDMTByN2RnanRxBHNIYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA3NnMwR2dGlkAw--/RV=2/RE=1480006665/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.unand.ac.id%2f19509%2f1%2fCover.pdf/RK=0/RS=.UNvQSDV\\_WqiHaywipOJEEwdjV8-](http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2oKmMiIqzZY.HIAywD3RQx.;_ylu=X3oDMTByN2RnanRxBHNIYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA3NnMwR2dGlkAw--/RV=2/RE=1480006665/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.unand.ac.id%2f19509%2f1%2fCover.pdf/RK=0/RS=.UNvQSDV_WqiHaywipOJEEwdjV8-), (diakses pada tanggal 22 April 2016 pada pukul 16.00).





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RYAN IRFIAN  
 NIM / Periode lulus : E01112034 / Periode II 2016/2017  
 Tanggal Lulus : 18 Oktober 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IA  
 Program Studi : IAN  
 E-mail address/ HP : ryanirfian@gmail.com / 089693366176

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Publika* (\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambal Nomor 4 Tahun 2013  
 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selatun Timur

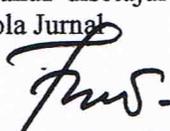
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
  
 Dr. Rendi, S.Sos, M.AB  
 NIP. 197203052008121003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 22 November 2016  
  
 RYAN IRFIAN  
 NIM. E01112034

Catatan :  
 \*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)